

Epicentrum of Social Education Research

ISSN: xxxxxxxx

**LEARNING SOCIAL VULNERABILITY: A STUDY OF INDONESIAN
MIGRANT WORKERS IN HONGKONG DURING THE COVID-19
PANDEMIC**

Nisrina Muthahari¹, Ridwan Wahyudi²

¹Sociology Department, Faculty of Social Sciences and Humanities Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ²Infest Yogyakarta,
Email: nisrina.muthahari@uin-suka.ac.id¹, ridwan@infest.or.id²

Abstract:

When Covid-19 health pandemic has crossed over worldwide, migrant workers have stood in a vulnerable condition due to violations of migrants' rights, impartial policies and being far from the social space. The Covid-19 pandemic has placed migrant workers in increasingly layered conditions of vulnerability. This study aims to identify the vulnerability of Indonesian migrant workers in Hongkong SAR, China, during the Covid-19 pandemic. Hongkong SAR, China, is one of the favorite destinations of Indonesian Migrant Workers and also is closest to mainland China as the epicenter of Covid-19. This qualitative research with a case study approach involves virtual in-depth interviews with Indonesian migrant workers in Hongkong SAR, China. In addition to interviews, data were also obtained from secondary sources from journal articles, research reports, and working papers. The results showed that migrant workers in Hongkong SAR, China, during the Covid-19 pandemic experienced precarious conditions such as a heavier workload, violated rights and exclusion, and stigmatization. Therefore, Indonesian government representative should improve migration data by integrating from the downstream until upstream level and engage communities to distribute the emergency aids. In addition to that embassy has to increase their services by negotiating with the authorities for improving migrant rights condition and integration with Hongkong SAR, China, communities.

Keywords: *Covid-19 Pandemic; Hongkong; Indonesian Migrant Workers; Vulnerability,*

INTRODUCTION

Akhir tahun 2019 menjadi titik awal munculnya corona virus atau covid-19 yang mematikan di Wuhan, Tiongkok. Covid-19 dengan cepat menyebar di berbagai belahan dunia yang kemudian memengaruhi dan mengubah berbagai aspek kehidupan. Covid-19 menyebabkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi secara bersamaan di berbagai negara. Menyebarnya virus ini dengan cepat membuat organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) menetapkan sebagai pandemi global pada Maret 2020. Hal ini telah membuat perubahan signifikan pada -- yang tidak hanya pada

bidang kesehatan--melainkan juga ekonomi. Beberapa imbas yang terjadi pada bidang ekonomi mencakup layanan konsumsi dan perdagangan, sistem pangan nasional, dan upah rendah dan pengangguran (OCHA, 2020). Semua negara ditantang untuk merespons layanan terbaik bagi warga negara ketika bencana kesehatan global terjadi.

Sektor migrasi yang terkait erat dengan sektor ekonomi tidak luput dari dampak pandemi Covid-19. Saat status pandemi ditetapkan, penghentian penempatan pekerja migran dilakukan karena perjalanan antar negara dibatasi (Jones et al., 2021). Data penempatan yang tercatat oleh BP2MI pada 2019 menyebutkan ada 70.840 pekerja migran yang ditempatkan di Kawasan Administrasi Khusus (KAK) Hongkong, Tiongkok (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2020). Penempatan pekerja migran mengalami penurunan pada 2020, yakni terdapat 53.206 pekerja migran dari penempatan tahun sebelumnya sebanyak 71.779 PMI yang ditempatkan di KAK Hongkong, Tiongkok, ketika Covid-19 telah menyebar ke beberapa negara. Jumlah di atas merupakan data pekerja migran yang berangkat secara prosedural dan didokumentasikan oleh pemerintah, di luar itu terdapat pekerja migran yang berangkat secara tidak prosedural atau bahkan tidak berdokumen sama sekali.

Situasi sulit sebagai akibat Covid-19 yang dihadapi pekerja migran di KAK Hongkong Tiongkok, bahkan sudah dimulai sejak akhir Januari 2020, karena KAK Hongkong Tiongkok berbatasan langsung dengan Tiongkok daratan. Kepanikan akibat Covid-19 menyebabkan masyarakat KAK Hongkong Tiongkok berlomba-lomba untuk memborong bahan makanan, obat-obatan, masker dan hand sanitizer. *Panic buying* tidak hanya dialami oleh penduduk asli KAK Hongkong Tiongkok, namun juga pendatang atau pekerja migran yang berada di sana. Kepanikan terjadi karena secara historis, KAK Hongkong Tiongkok pernah memiliki pengalaman buruk akibat virus SARS (Saiidi, 2020). Kegiatan-kegiatan bersifat publik yang mengumpulkan banyak orang mulai dibatasi, hingga maksimal orang berkumpul hanya 4 orang. Jika melanggar aturan tersebut, maka akan mendapatkan denda (Hasugian, 2020). Mobilitas dibatasi lewat himbauan yang diserukan oleh pemerintah KAK Hongkong Tiongkok. Salah satunya adalah himbauan agar pekerja migran tidak keluar dari rumah majikannya, bahkan saat hari libur tiba.

Kondisi di negara tujuan penempatan tersebut menempatkan pekerja migran Indonesia pada keadaan rentan. Pekerja migran di KAK Hongkong Tiongkok yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) kerap ditempatkan pada situasi yang membuat mereka rentan tertular virus. PRT

berada di garda terdepan yang bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah. Tak jarang dari mereka yang kemudian disuruh oleh majikan untuk berbelanja di pasar yang penuh sesak tanpa dibekali alat pelindung diri yang layak. Sebagai pendatang asing di negara orang, pekerja migran juga jauh dari akses untuk mendapatkan pertolongan dari kerabat atau sanak saudara terdekat.

Sejumlah studi terdahulu mengenai kerentanan pekerja migran di masa pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh beberapa pihak. Studi yang dilakukan oleh Migrant Care bekerja sama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS) menemukan situasi pekerja migran yang mengalami kerentanan di masa pandemi Covid-19. Meski tidak berfokus pada pekerja migran di negara tertentu, studi Migrant Care menemukan bahwa pekerja migran berada pada episentrum Covid-19, terstigmatisasi sebagai pembawa virus, dibatasi mobilitasnya dan mendapat penambahan beban kerja (Susilo et al., 2020). Studi yang dilakukan Andika Wahab (2020: 1) terhadap pekerja migran di Malaysia menunjukkan bahwa kondisi pekerja migran berada pada situasi sulit dalam mengakses akomodasi layanan kesehatan. Pembatasan mobilitas melalui Movement Control Orders (MCO) yang dilakukan pemerintah membuat konsekuensi negatif pada kondisi kerja dan kondisi hidup yang genting. De Haan dalam studinya terhadap pekerja migran di India juga menunjukkan bahwa pandemi memperkuat ketidaksetaraan ekonomi, sosial dan gender. Studi De Haan memberikan perspektif komparatif dan historis tentang kondisi pekerja migran, karena kerugian yang dihadapi migran mengakar dalam struktur ekonomi dan sosial (de Haan, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan PMI KAK Hongkong Tiongkok pada masa pandemi Covid-19. Melalui pemetaan terhadap kerentanan tersebut, nantinya akan disusun sejumlah rekomendasi kebijakan yang mungkin akan berguna bagi pemerintah pusat atau perwakilan pemerintah RI di KAK Hongkong Tiongkok dalam proses pengambilan kebijakan.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif karena kualitatif akan mendapatkan kerincian dan kompleksitas dalam memahami sebuah isu atau fenomena (Creswell, 2007). Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu Juli-Oktober 2021 dengan fokus penelitian di KAK Hongkong Tiongkok. Peneliti mengambil fokus pada pekerja migran di KAK Hongkong Tiongkok karena berbatasan langsung dengan Tiongkok daratan sebagai negara pertama kemunculan kasus Covid-19. Data penelitian diperoleh melalui sumber primer

maupun sekunder. Sumber primer dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam secara online pada pekerja migran yang berada di KAK Hongkong Tiongkok. Sumber sekunder didapat dari studi literatur berupa jurnal, laporan riset, kertas kerja dan berita di website terpercaya. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penentuan informan secara purposive digunakan dalam situasi peneliti menggunakan penilaian dalam memilih kasus dengan tujuan tertentu (Neuman, 2007:142). Peneliti fokus pada informan pekerja migran Indonesia yang telah bekerja sebelum dan setelah pandemi Covid-19 terjadi, hal ini dilakukan untuk memperoleh data perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah Covid-19 terjadi.

LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai kerentanan sosial dalam konteks migrasi telah berkembang pesat, terutama sejak pandemi COVID-19 menyorot berbagai ketimpangan struktural yang dialami pekerja migran di berbagai negara. Penelitian oleh **Yeoh dan Lin (2021)** mengungkapkan bahwa pekerja rumah tangga migran di Hong Kong mengalami intensifikasi beban kerja, pembatasan ruang publik, dan kehilangan akses terhadap layanan sosial dasar selama pandemi. Studi ini menegaskan bahwa kerentanan bukan sekadar akibat dari posisi ekonomi yang lemah, melainkan juga hasil dari kebijakan publik dan diskriminasi sosial yang terstruktur. Dalam konteks pekerja migran Indonesia, **Raharto (2018)** menyampaikan bahwa kerentanan muncul dalam bentuk perlindungan hukum yang lemah, stereotipe kultural, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi. Kerentanan ini semakin terlihat saat pandemi COVID-19 ketika banyak pekerja migran kehilangan pekerjaan, mengalami isolasi sosial, dan tidak terjangkau oleh kebijakan jaminan sosial di negara tujuan.

Selain aspek kerentanan, penelitian mengenai **pembelajaran sosial dalam situasi krisis** menjadi penting untuk dipertimbangkan. **Lindawati dan Saptari (2020)** meneliti bagaimana komunitas pekerja migran perempuan mengembangkan strategi bertahan hidup melalui solidaritas komunitas, pertukaran informasi, dan inisiatif kolektif selama pandemi. Temuan ini menunjukkan adanya proses pembelajaran sosial yang bersifat adaptif dan kontekstual, yang terjadi di luar kerangka pendidikan formal. Selanjutnya, **Sim (2020)** menyoroti pentingnya pendekatan intersectionality dalam membaca kerentanan sosial pekerja migran, terutama perempuan yang menghadapi beban ganda antara peran kerja dan ekspektasi domestik. Dalam situasi pandemi, pengalaman kerentanan tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif yang mendorong tindakan bersama sebagai bentuk perlawanan sosial.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman krisis dapat menjadi ruang bagi pembelajaran sosial kritis. **Bohra-Mishra dan Massey (2011)** menyatakan bahwa dalam konteks migrasi, individu tidak hanya belajar beradaptasi terhadap struktur sosial yang menindas, tetapi juga mengembangkan kapasitas reflektif terhadap ketimpangan dan membentuk jaringan sosial sebagai sumber ketahanan. Dari tinjauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat celah penelitian dalam mengkaji **mekanisme pembelajaran kerentanan sosial** secara spesifik pada komunitas pekerja migran Indonesia di Hong Kong selama pandemi. Penelitian ini berkontribusi dengan menghadirkan perspektif pembelajaran sosial dalam kerangka migrasi dan krisis, serta mengkaji bagaimana pengalaman kerentanan dikonstruksikan, dimaknai, dan direspons melalui proses belajar sosial berbasis pengalaman kolektif.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Pekerja Migran sebagai Orang Non-Hongkong

Pada awalnya, kawasan Hongkong dibangun oleh budaya yang homogen, yakni dari suku Yue yang menentukan garis batas teritorial. Pada masa kolonial ketika Inggris berkuasa dan Hongkong menjadi kawasan yang maju perekonomiannya, maka masuklah saudagar dari Portugis, pelaut dari bangsa Malay, tentara dari India, yang menandakan percampuran multikultur terjadi (Tsang, 2007). Akan tetapi, Tsang juga menggambarkan bahwa orang Inggris memiliki keunggulan dan standar kehidupan yang lebih baik ketimbang di negaranya sendiri. Pada tahun 1840-an hingga 1860-an, ketika Hongkong mengalami kemajuan yang sungguh pesat, pergerakan imigran etnis Tiongkok daratan meningkat. Hal ini diikuti dengan pergerakan keluar oleh komunitas Hongkong ke pelbagai penjuru dunia (Tsai. J. F., 1993).

Pada masa pendudukan Jepang atas Hongkong di era Perang Dunia Kedua, sebagaimana catatan Tsang (1995), perubahan atas kemerdekaan teritorial, demokrasi, dan pengakuan identitas Hongkong diinisiasi oleh gubernur pada tahun 1946. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Hongkong lebih memiliki rasa kepemilikan dan kesetiaan atas Hongkong tanpa menghiraukan ras. Namun, setelah kepergian pemerintah kolonial Inggris dari Hongkong, justru membuat diskriminasi ras terjadi. Dengan demikian, lahirlah Bill of Rights Ordinance (BORO) pada 1991 yang diikuti pendirian Equal Opportunities Commission (EOC), yang mengatur bahwa tindakan rasial adalah perbuatan ilegal dan dapat dikenai sanksi.

Pasca itu, dengan meningkatnya industri dan kelompok perempuan Hongkong mulai memasuki

dunia karir, kebutuhan untuk mengurus anak-anak dan orang tua mereka menjadi perhatian. Pada awalnya, masyarakat Hongkong melihat potensi pekerja asal Filipina yang fasih berbahasa Inggris untuk mengisi pekerjaan sebagai pengasuh anak-anak dan perawat orang tua, lalu diikuti pula pekerja asal Indonesia karena pada saat yang bersamaan Indonesia mulai mempromosikan penduduknya yang ingin bekerja di luar negeri (Sautman & Kneehans, 2002).

Gelombang pekerja migran Indonesia ke KAK Hongkong Tiongkok terjadi pada awal tahun 1990-an. Hingga saat ini, KAK Hongkong Tiongkok merupakan salah satu negara tujuan favorit bagi pekerja migran Indonesia. Daya tarik KAK Hongkong Tiongkok sebagai negara tujuan penempatan disebabkan karena pelbagai hal, seperti gaji pekerja migran, keamanan, jaminan sosial hingga kebebasan. Pekerja Migran Indonesia di KAK Hongkong Tiongkok terikat oleh kontrak kerja standar dua tahun yang dapat diperbaharui ketika kontrak selesai. Mereka juga berhak atas libur satu hari setiap minggu, libur-libur nasional KAK Hongkong Tiongkok dan libur saat kontrak selesai untuk kembali negara asal. Salah satu pihak, baik majikan maupun pekerja dapat mengakhiri kontrak dengan pemberitahuan satu bulan sebelumnya (one month notice). Minat PMI untuk dapat bekerja di KAK Hongkong Tiongkok dimanfaatkan sepenuhnya oleh agen pencari kerja. Agen menentukan persyaratan tertentu bagi PMI, salah satunya diperuntukkan bagi mereka yang telah berpengalaman bekerja di luar negeri. Beberapa di antaranya membedakan kapasitas pekerja migran dalam relasi kerja, seperti pekerja asal Filipina bagi majikan yang menginginkan pekerja fasih dalam bahasa Inggris, sementara dari Indonesia dengan kualifikasi bahasa kantonis sebagai bahasa lokal masyarakat KAK Hongkong Tiongkok (Constable, 2007).

Agen juga mempromosikan pekerja asal Indonesia yang lebih fleksibel, patuh, dan bersedia menjalankan jam kerja dengan rata-rata 17 jam per hari dan 24 jam dalam panggilan (Amnesty International, 2013). Kondisi ini menunjukkan di mana stereotip berdasarkan ras dan kebangsaan dibentuk di dalam relasi kerja yang dipromosikan oleh agen perekrutan (Palmer, 2020). Pekerja asal Indonesia mengalami situasi sulit selama bekerja di KAK Hongkong Tiongkok. Mereka melalui pelbagai tahapan migrasi, lilitan hutang untuk membiayai biaya penempatan, dan kekerasan fisik dan pelecehan seksual (Sim, 2009).

Problem lain yang dihadapi pekerja migran adalah tidak diperbolehkannya mereka untuk membawa pasangan ke negara tujuan penempatan. Pekerja harus siap untuk terpisah dari pasangan mereka dan menjalin hubungan jarak jauh. Setelah kontrak pekerja migran selesai, pekerja diharuskan meninggalkan KAK Hongkong Tiongkok dalam waktu dua minggu sejak tanggal pemutusan hubungan

kerja, kecuali jika mereka menemukan majikan baru. Padahal hak reunifikasi atau hak berkumpul dengan pasangan, orang tua, dan anak-anak mereka merupakan salah satu hak yang melekat bagi pekerja migran di dalam konvensi pekerja migran 1990. Akan tetapi, hampir semua negara anggota PBB mengesampingkan hak tersebut, meski mereka telah meratifikasi konvensi. Sebagaimana Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang tidak mengakui hak reunifikasi bagi pekerja migran dan anggota keluarganya.

Perempuan PMI yang jauh dari relasi keluarga harus tinggal bersama di rumah majikan sebagai pekerja rumah tangga di KAK Hongkong Tiongkok. Sebagian mereka tidak mendapatkan kamar pribadi dan terjaga privasinya karena seluruh ruangan dilengkapi dengan kamera pengintai. Terlebih lagi, beberapa majikan masih menawarkan kontrak kinship atau kontrak kekerabatan bagi PRT migran Constable (2019) berpendapat bahwa budaya “amah atau muijai” masih dipegang teguh oleh beberapa keluarga Hongkong dengan samaran “adopted daughter”. Budaya amah digambarkan sebagai individu perempuan di luar garis keturunan sebuah keluarga yang membantu mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak, dan merawat orang tua di dalam sebuah rumah keluarga. Majikan juga menyediakan makanan yang cukup dan diizinkan tinggal bersama di dalam kediaman rumah sebuah keluarga. Akan tetapi, amah atau muijai ini tidak mendapatkan upah dari tanggung jawabnya di dalam rumah. Ketika amah atau muijai telah menikah, kontrak kinship akan batal dengan sendirinya atau mereka akan dibebaskan dari tanggung jawabnya. Mereka mungkin masih melaksanakan tanggung jawabnya setelah menikah, tapi dengan status sebagai pelayan yang berbayar. Lebih lanjut Constable menegaskan bahwa sebenarnya praktik amah atau kontrak kinship adalah bentuk dari perbudakan pada masyarakat modern yang sudah dihapuskan sejak 1923 ketika Inggris berkuasa di Hongkong.

2. Beban Berlipat Pekerja Migran Saat Pandemi Covid-19

Kasus pertama covid-19 di KAK Hongkong Tiongkok ditemukan pada Januari 2020. Situasi panik membuat masker, tisu, hand sanitizer dan vitamin langka. Setiap orang yang tinggal di KAK Hongkong Tiongkok berusaha untuk memborong kebutuhan tersebut yang menyebabkan *panic buying* terjadi. Kepanikan tersebut membuat masker dan kebutuhan lain langka, hal ini pun dialami oleh pekerja migran. Saat itu masker sulit didapat, dan jika pun masker didapat, maka harga yang diperoleh sangat tinggi. Selain itu, meski majikan diimbau untuk menyediakan masker, hand sanitizer, vitamin, tak semua majikan melakukan hal tersebut. Tidak sedikit dari PMI yang masih harus mengusahakan masker,

vitamin maupun hand sanitizer untuk kebutuhan dirinya sendiri karena tidak disediakan oleh majikan.

Situasi pandemi yang buruk membuat banyak majikan melakukan pembatasan pergerakan pada pekerja migran untuk meminimalkan keterpaparan virus. Pemerintah KAK Hongkong Tiongkok juga mengimbau pada pekerja migran untuk tinggal di rumah di hari libur mereka. Hal ini dialami oleh IN, pekerja migran KAK Hongkong Tiongkok sekaligus mahasiswa UT kelompok belajar di KAK Hongkong Tiongkok dalam sesi webinar bersama Voice of Migrants.

“Waktu awal-awal covid hampir 3 bulan tidak libur, tidak boleh keluar dari rumah. Dikurung di rumah, tapi alhamdulillah kebutuhan dipenuhi majikan. Setelah itu boleh dikasih waktu oleh libur, tetapi ada peraturan dari majikan kalau jam 1 harus pulang walaupun hanya dibawah rumah. Majikan selalu waspada, harus jaga kesehatan, pola makan jangan sembarangan. Kalau pekerjaan yang banyak saya tidak mengalami karena beda-beda.” IN, PMI Hongkong.

Sejak pandemi, pekerja migran mendapat beban pekerjaan berlipat ganda. Majikan dan anak-anak majikan tinggal di rumah selama 24 jam dan membuat pekerja migran harus bekerja ekstra dibandingkan jam kerja normal. Majikan menjadi lebih hati-hati terhadap kebersihan rumah dan menyuruh pekerjanya untuk membersihkan rumah lebih sering lagi. AN mengalami ini, majikan menyuruhnya untuk membersihkan kamar mandi dua kali dibanding hari-hari biasanya.

“Sejak covid, kamar mandi yang sudah dicuci (dibersihkan), nanti disuruh cuci lagi ketika majikan bangun. Masak pagi, siang, malam di rumah terus.”- AN, PMI Hongkong.

Cerita mengenai kebersihan rumah ini juga dialami oleh majikan DN, DN mengaku tiap kali anak-anak majikan membawa teman-teman ke rumah, setelahnya ia harus mengelap kursi dan barang-barang yang disentuh dan mengepel kembali kamar tamu rumah. Selama pandemi dirinya juga menjadi lebih sibuk mengurus anak-anak majikannya di rumah. Anak-anak yang sekolah dari rumah bangun lebih siang, berdampak pada tidur siang dan tidur malam yang molor. Waktu tidurnya tersita karena anak-anak belum tidur saat malam, sementara ia harus bangun di jam biasa. DN juga memasak lebih dibanding biasanya. Anak-anak yang berada di rumah membuatnya untuk memasak camilan setiap hari dari pagi sampai siang. Ia juga harus bekerja membersihkan rumah setelah anak-anak selesai sekolah di rumah menggunakan aplikasi online. Anak-anak sekolah menggunakan aplikasi online dan diharuskan untuk membuka kamera, sementara itu ruangan-ruangan antar rumah sempit sehingga tidak leluasa bagi DN untuk bergerak. Tambahan pekerjaan di masa pandemi yang lebih banyak tidak serta merta membuat gajinya bertambah. Gaji tidak bertambah, begitu juga dengan bonus yang juga tidak bertambah karena pendapatan majikan berkurang banyak.

“Nggak ada tambahan gaji. Malah kemarin pas tahun baru kerjaan banyak dan saya tetap seperti biasa membersihkan banyak. Badan sampai pegel-pegel, saya pijat sampai habis HKD300. Angpau saya dari majikan cuma HKD200, padahal tahun sebelumnya HKD1000-1500.” DN, PMI di Hongkong. Efek pandemi juga memengaruhi pola komunikasi pekerja migran dengan orang yang berada di luar rumah. Majikan yang berada 24 jam di rumah membuat pekerja selalu merasa diawasi. Pekerja menjadi sungkan untuk menelpon atau menerima telepon karena ada majikan. Komunikasi yang terbatas membuat pekerja migran rentan menghadapi stres, apalagi saat hari libur tiba, ada batasan bagi pekerja migran berkumpul. Pembatasan berkumpul untuk maksimal 4 orang di tempat publik membuat ruang gerak menjadi terbatas.

Kegiatan-kegiatan organisasi pekerja migran yang seharusnya bisa dilakukan dengan banyak orang tidak bisa diselenggarakan. Menurut IN, semua kegiatan organisasinya tertunda karena pandemi Covid-19. Ketika berkumpul lebih dari dua orang di basecamp organisasinya, mereka harus hati-hati karena kantor polisi berada di dekat mereka. Mereka yang berkumpul lebih dari 4 orang terancam mendapatkan denda dari pemerintah KAK Hongkong Tiongkok. Berkumpulnya pekerja migran dalam komunitas atau organisasi sebenarnya merupakan cara mereka untuk mengurangi stres karena tekanan pekerjaan. Sebagai gambaran, ada pelbagai organisasi pekerja migran di KAK Hongkong Tiongkok, baik yang telah terdaftar di Konsulat Jenderal RI KAK Hongkong Tiongkok, maupun yang belum terdaftar. Organisasi-organisasi pekerja migran memiliki corak beragam, ada yang berbasis budaya, daerah, agama, serikat buruh, hobi dan sebagainya.

Setiap organisasi atau komunitas berkegiatan pada hari libur atau hari minggu. Mereka berkumpul dan berinteraksi dengan sesama anggota di tempat publik terbuka. Kegiatan mereka cukup beragam, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengumpulkan masa dalam jumlah besar, ada juga yang berkumpul dengan sedikit orang. Berkumpulnya pekerja migran dalam wadah organisasi atau komunitas merupakan salah satu cara untuk menjaga kewarasan di negara penempatan. Jauh dari keluarga membuat pekerja mencari “keluarga baru” yang tergabung dalam organisasi tersebut.

3. Pekerja Migran dan Hak yang Terlanggar

Peraturan di Hongkong melarang pekerja migran untuk tinggal di luar tempat tinggal majikan. Padahal, rata-rata tempat tinggal majikan berada di apartemen dengan luas ruangan yang relatif kecil. Tidak jarang mereka harus berbagi kamar dengan orang lain seperti anak-anak majikan atau bahkan tidur di ruang tamu atau dapur. Pada beberapa kasus, pekerja migran di KAK Hongkong Tiongkok dapat tinggal di luar rumah majikan, terlebih jika majikan baik dan bertanggung jawab untuk menyediakan

fasilitas tempat tinggal di luar.

Selain problem tersebut, jika pekerja migran mendapat majikan yang tidak menyenangkan, mereka akan mendapat hak yang tidak sesuai dengan kontrak. Mengenai makanan misalnya, mereka harus makan menu sesuai dengan apa yang dimakan oleh majikan. Padahal, pekerja migran memiliki hak untuk memilih makan di luar dengan biaya dari majikan atau makan sesuai yang disediakan majikan. Jika tidak, majikan harus menyediakan food allowance bagi perempuan PRT agar mereka bisa makan di luar (Labour Department, 2019). Pun demikian mengenai hak untuk berkomunikasi, ada juga majikan yang sampai saat ini masih membatasi komunikasi pekerjaanya.

Sebenarnya tidak hanya majikan yang melanggar hak pekerja, agensi dan perusahaan penempatan secara berjamaah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran. Mayoritas pekerja migran di KAK Hongkong Tiongkok ditempatkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) swasta di Indonesia yang bekerja sama dengan agensi di sana. Agensi berperan sebagai pihak ketiga yang menghubungkan pekerja dengan majikan atau pengguna. Problem antara pekerja, agensi dan perusahaan penempatan yang kerap kali timbul overcharging atau biaya penempatan berlebih yang selalu diikuti dengan penahanan dokumen.

Biaya penempatan pekerja migran di KAK Hongkong Tiongkok menurut Kepmenaker 8 tahun 2012 terkait komponen dan besarnya biaya penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik negara tujuan KAK Hongkong Tiongkok adalah Rp14.790.400. Sering kali agensi dan perusahaan penempatan memberikan biaya penempatan berlebih pada pekerja migran melebihi peraturan yang ada. Pekerja migran kerap kali harus membayar biaya dua kali lipat dibandingkan dengan biaya resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Agensi perekrutan juga menyamaratakan biaya penempatan sebagai PMI non-pengalaman yang berkonsekuensi seharusnya PMI berpengalaman menanggung biaya lebih rendah.

Pelanggaran hak lainnya yang dilakukan oleh majikan yakni terkadang diabaikannya pembayaran upah pemutusan kerja (severance payment) dan upah tunjangan jangka panjang (long service payment). Kedua-duanya harus diterima oleh PMI jika majikan tidak berkenan memperpanjang kontrak kerja. Severance payment adalah upah yang harus diterima oleh PMI ketika merampungkan dua tahun kontrak kerja dengan majikan yang sama dan majikan tidak memperpanjang kontraknya lagi. Sedangkan long service payment adalah upah yang diterima ketika PMI telah bekerja di tempat majikan yang sama minimal empat tahun berturut-turut. Sementara perhitungan besaran upah antara severance

payment dan long service payment hampir sama yakni gaji terakhir dikalikan $\frac{2}{3}$ dan dikalikan lama tahun bekerja. Kedua-duanya tidak berlaku jika PRT migran yang mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada majikan (Labour Department, 2019)

International Organization for Migration (IOM) menemukan bahwa pekerja migran sering kali dikecualikan dari sistem jaminan sosial negara penempatan (Guadagno, 2020). Padahal, jaminan sosial merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal dan harus dimiliki setiap masyarakat, termasuk pekerja migran rumah tangga. Jaminan sosial juga penting dalam situasi pandemi Covid-19, yang mana kerentanan terhadap penularan Covid-19 tinggi beserta dengan penyakit-penyakit lain yang menyertainya.

4. Eksklusi dan Stigmatisasi Pada Pekerja Migran

Sebelum pandemi Covid-19, pekerja migran KAK Hongkong Tiongkok telah mengalami pelbagai problem-problem dasar yang rentan mereka alami. Ketika pandemi Covid-19 terjadi, eksklusi dan stigmatisasi dialami oleh pekerja migran KAK Hongkong. Pengabaian terhadap pekerja migran sebenarnya menempatkan mereka pada risiko infeksi lebih tinggi. Ketika telah terinfeksi, mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu karantina di ruangan sempit selama berhari-hari.

Pekerja migran beberapa kali didesak oleh pemerintah mematuhi langkah-langkah untuk jaga jarak dan tinggal di rumah mereka selama hari libur tanpa memberikan perlindungan optimal mengenai ini. Belakangan ini, pemerintah KAK Hongkong malah mewajibkan pekerja migran untuk melakukan tes swab secara berkala karena dianggap sebagai kelompok yang rentan menularkan virus. Kebijakan untuk melakukan tes ini tidak dibarengi dengan jumlah lokasi tes sehingga terjadi penumpukan antrian yang berjubel di beberapa tempat. Pemerintah KAK Hongkong juga mengimbau untuk vaksin bagi para pekerja, namun tidak dibarengi dengan kebijakan pertolongan apa yang akan dilakukan jika setelah vaksin pekerja mengalami sakit atau bahkan pingsan seperti dialami beberapa pekerja migran dari Filipina.

Bentuk eksklusi lain yakni, pengabaian atas hak informasi yang mudah dipahami oleh pekerja migran. Informasi terhadap sumber-sumber terkait pandemi, vaksin maupun tes merupakan hal penting. Akses informasi yang mudah membuat mereka dapat mengambil keputusan secara tepat yang berhubungan dengan masalah kesehatannya. Banyak pekerja migran melaporkan mencari informasi kesehatan sendiri. Untuk itu, diperlukan lebih banyak upaya dari departemen pemerintah terkait untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif dalam bahasa yang mudah dipahami oleh mereka.

Stigmatisasi terhadap pekerja migran semakin bertambah di masa pandemi Covid-19. Menurut survei yang dilakukan FADWU, empat dari lima pekerja migran mengalami peningkatan diskriminasi selama pandemi berlangsung. Mereka juga dituduh oleh majikan sebagai orang yang menularkan virus. Sebenarnya mereka dapat memprotes ini dan melaporkannya pada Equal Opportunities Commissions (EOC), tapi banyak yang takut kehilangan pekerjaan jika mereka melaporkan. Selain itu, ada mitos urban diskriminatif yang sudah lama berkembang di KAK Hongkong, bahwa pekerja migran tidak higienis dan ini memperburuk liputan media dan kelalian pemerintah KAK Hongkong untuk melindungi mereka.

Stigmatisasi juga diterima oleh pekerja migran yang menggunakan transportasi umum, ini bahkan sering kali mereka temui bahkan sebelum pandemi. Acap kali mereka dipandang oleh warga Hongkong dengan tatapan sinis ketika menggunakan transportasi umum. Padahal transportasi umum merupakan hak bagi siapapun yang berada di sana, dan transportasi umum sangat terjangkau dan diandalkan penduduk KAK Hongkong. Ketika pandemi terjadi, tatapan sinis terhadap pekerja migran semakin menjadi karena dianggap sebagai penyebar virus.

Televisi dan pemberitaan di media mengenai pekerja migran yang terinfeksi virus semakin membuat posisi pekerja terpojok. Kebijakan test swab dan vaksin bagi seluruh pekerja migran menempatkan mereka pada stigmatisasi yang rumit. Kewajiban vaksin melanggar otonomi pekerja migran untuk memilih hak atas kesehatan mereka sendiri. Dengan terus menarik perhatian PRT karena dianggap kurang patuh. Ini menunjukkan bahwa publik harus secara khusus memperhatikan PRT, dan mungkin telah berkontribusi pada diskriminasi, standar ganda, dan pembatasan yang diberlakukan oleh pemberi kerja yang disebutkan oleh peserta kami. Problem kesehatan mental merupakan problem yang dihadapi sebelum pekerja migran berhadapan dengan pandemi. Setelah pandemi kesehatan mental menjadi masalah serius. Pekerja menerima beban kerja lebih berat. Selain itu mereka tidak bisa berkumpul dengan teman-teman seperti biasanya.

CONCLUSION

Pada masa darurat pandemi global, seluruh negara di dunia ditantang untuk mengatasi kompleksitas permasalahannya yang tidak hanya pada masalah kesehatan semata. Efek berantai yang diakibatkan virus yang mudah menular melalui sistem sirkulasi manusia berdampak pada ruang sosial dan ekonomi. PMI yang berada pada ruang melintas batas negara karena meletakkan eksistensinya pada perpindahan tak luput dari risiko yang berlipat ganda. Risiko itu berawal dari identitasnya yang sebagai

non-penduduk lokal berupaya mendapatkan layanan dasar sebagaimana penduduk lokal. Sementara, tradisi masyarakat KAK Hongkong Tiongkok yang mengkonstruksi eksistensi PMI yang bekerja di sektor rumah tangga telah lama melabelkan kelompok tersebut pada masyarakat non-utama. Dengan demikian, marginalisasi yang dialami oleh PMI sulit mendapatkan akses sebagaimana penduduk lokal.

Implikasi dari eksistensi sebagai penduduk non-lokal sepertinya wajar jika penduduk lokal selalu dilekatkan beban ganda dalam segala pekerjaan rumah tangga, termasuk menambah pekerjaannya ketika masa pandemi Covid-19. PMI dipaksa bekerja melebihi masa, beban kerja meningkat, ketiadaan upah lembur, tidak dibekali alat pelindung diri, dan dicap sebagai pembawa virus. Sementara itu, akses informasi yang valid dan kredibel juga sulit disaring mengingat membeludaknya disinformasi dan hoaks di media sosial. Sementara itu, PMI memiliki keterbatasan akses terhadap komunitasnya yang dapat memberikan dukungan sosial dan mental karena hak Bergeraknya juga dibatasi di masa pandemi Covid-19.

Strategi perlindungan terhadap pekerja migran dalam situasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan penghentian sementara penempatan pekerja migran ke luar negeri. Pemerintah melakukan penghentian penempatan sementara sebagai untuk mencegah penyebaran Covid-19. Keputusan penghentian sementara penempatan migran tertuang dalam Kepmenaker RI Nomor 151 tahun 2020 yang mulai berlaku sejak 20 Maret 2020. Pekerja migran yang sudah terlanjur mendaftar, menjalani Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dan tinggal berangkat, tidak dapat ke luar negeri sejak keputusan tersebut berlaku. Oleh sebab itu, jaring pengaman sosial perlu ditingkatkan dengan mengembangkan data hingga level desa bagi PMI yang terdampak untuk akses pekerjaan di luar negeri.

Situasi Covid-19 di masing-masing negara tujuan penempatan pekerja migran berbeda-beda, sehingga akan lebih baik jika strategi perlindungan untuk setiap PMI di negara tujuan ditaksir terlebih dahulu kebutuhannya. Dengan begitu, bantuan yang diberikan akan tepat sasaran dan mengurangi risiko yang semakin buruk. Di KAK Hongkong, PMI di awal-awal masa pandemi membutuhkan masker yang saat itu sulit didapatkan. Pelindungan terhadap hak-hak pekerja migran yang mengalami beban kerja berlebih di rumah majikan juga menjadi hal yang sebaiknya dilakukan, misalkan dengan meminta pemerintah KAK Hongkong Tiongkok untuk memperlakukan PMI secara layak. Oleh karena itu, pemerintah perwakilan semestinya meningkatkan pelindungan ekstra ketika masa pandemi Covid-19. Salah satunya mungkin dengan melibatkan komunitas PMI di KAK Hongkong Tiongkok yang dapat membantu PMI dalam mengatasi masalahnya, baik dalam sengketa ketenagakerjaan maupun kesehatan.

REFERENCES

- Amnesty International. (2013). *Exploited for profit, failed by governments: Indonesian migrant domestic workers trafficked to Hongkong*. 1–56. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/029/2013/en/>
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2020). Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2020. *Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, 16–18. [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf)
- Constable, N. (2007). *Maid to order in Hongkong: Stories of migrant workers (2nd ed.)*. Cornell University Press.
- Constable, N. (2019). Maids, Mistresses, and Wives: Rethinking Kinship and the Domestic Sphere in Twenty-First Century Global Hongkong. In *The Cambridge Handbook of Kinship (Cambridge Handbooks in Anthropology, pp. 371-390)*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches, 2nd edition* (2nd editio). Sage Publications.
- de Haan, A. (2020). Labour Migrants During the Pandemic: A Comparative Perspective. *Indian Journal of Labour Economics*, 63(4), 885–900. <https://doi.org/10.1007/s41027-020-00283-w>
- Guadagno, L. (2020). Migrants and the COVID-19 pandemic : An initial analysis. In *International Organization of Migration. Migration Research Series*. Lorenzo
- Hasugian, M. R. (2020). *No Title*. Tempo. <https://dunia.tempo.co/read/1329415/cerita-pahit-dan-manis-ida-buruh-migran-saat-hong-kong-lockdown>
- Jones, K., Mudaliar, S., & Piper, N. (2021). *Locked down and in limbo: The global impact of COVID-19 on migrant worker rights and recruitment*. www.ilo.org/publns.
- Labour Department. (2019). Know Your Obligations: Be Responsible and Smart Employer. In *A Handbook for Employing Foreign Domestic Helpers*. Labour Department.
- Neuman, L. (2007). *Basics of Social Research Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson.
- OCHA, U. (2020). Penanganan Covid19. In *Rencana Operasi Multisektor Penanganan Covid-19 Indonesia*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>.
- Palmer, W. (2020). International Migration and Stereotype Formation: Indonesian Migrants in Hongkong. *Journal of International Migration and Integration*, 21(3), 731–744. <https://doi.org/10.1007/s12134-019-00680-1>
- Saiidi, U. (2020). *No Title*. CNBC. <https://www.cnbc.com/2020/07/03/how-hong-kong-beat-coronavirus-and-avoided-lockdown.html>

- Sautman, B., & Kneehans, E. (2002). The Politics of Racial Discrimination in Hongkong. In *Maryland Series in Contemporary Asian Studies* (Vol. 2, pp. 47–53).
- Sim, A. (2009). The sexual economy of desire: Girlfriends, boyfriends and babies among Indonesian women migrants in Hongkong. In *The sexual economy of desire: Girlfriends, boyfriends and babies among Indonesian women migrants in Hongkong*.
[#0](http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:The+Sexual+Economy+of+Desire+:++Girlfriends+,+Boyfriends+and+Babies+Among+Indonesian+Women+Migrants+in+Hong+Kong)
- Susilo, W., Arista, N., & Evi, Z. (2020). Kerentanan Pekerja Migran Indonesia Menghadapi Wabah COVID-19. *CSIS Commentaries DMRU-024-ID*, 151, 1–6.
- Tsai, J. F. (1993). *Hongkong in Chinese History: Community and Social Unrest in the British Colony, 1842-1913*. Columbia University Press.
- Tsang, S. (1995). *Government and Politics*. Hongkong University Press. Tsang, S. (2007). *A Modern History of Hongkong*. I.B. Tauris Publisher.
- Wahab, A. (2020). The outbreak of Covid-19 in Malaysia: Pushing migrant workers at the margin. In *Social Sciences & Humanities Open* (Vol. 2, Issue 1, p. 100073).
<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100073>